



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 889/IV/XI/2015

RUU MEREK PERMUDAH AKSES PENDAFTARAN



INDONESIA HARUS
PROTES KLAIM
TIONGKOK ATAS LAUT
CHINA SELATAN



MKD
HARUS JAGA
KEPERCAYAAN
PUBLIK

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



RUU MEREK PERMUDAH AKSES PENDAFTARAN



Ketua dan Anggota Pansus RUU Merk kunjungi Dirjen kekayaan Intelektual Kemenkumham

Panitia Khusus DPR RI yang bertugas membahas revisi Undang-Undang tentang Merek melakukan kunjungan lapangan ke Direktorat Jenderal (Dirjen) kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Kunjungan ini dimaksudkan ingin mengetahui pelayanan yang diberikan Dirjen Kekayaan Intelektual kepada masyarakat terkait pendaftaran merek.

“Kami (Pansus RUU Merek) ingin melihat kondisi riil lapangan, bagaimana Sumber Daya manusia (SDM) yang *support*, dan kesiapan dari Dirjen Kekayaan Intelektual terkait dengan adanya inisiatif Pemerintah untuk mengganti UU tentang Merek,” jelas Ketua Pansus RUU Merek Desy Ratnasari, Selasa (17/11), di Gedung Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta.

Tentunya ini menjadi konsen di Pansus RUU Merek, kata Desy, jangan sampai ketika disahkan UU tentang Merek, tapi infrastrukturnya tidak dipersiapkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan, dalam pertemuan

itu ada beberapa hal yang terutama diinginkan Pemerintah, yaitu melakukan Ratifikasi Protokol Madrid. *Madrid Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 14 April 1891 telah direvisi sebanyak enam kali dari tahun 1900 hingga 1967 untuk menambah jumlah negara-negara anggota.

Berdasarkan *Agreement* ini *International Application* hanya dapat didasarkan pada merek nasional yang telah terdaftar. Berangkat dari Madrid *Agreement* ini maka dibuatlah Madrid *Protocol*. *Protocol* ini berlaku sejak 1 April 1996 dengan memperkenalkan inovasi-inovasi pada sistem Madrid dengan tujuan untuk memperluas cakupan geografis dari pendaftaran merek atau melakukan harmonisasi sistem pendaftaran merek.

Pansus RUU Merek masih mempertimbangkan sejauh mana UMKM Indonesia atau pelaku industri kreatif Indonesia memang betul-betul sudah kesepakatan-kesepakatan global yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

dengan negara-negara lain, dalam hal ini misalnya dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Kami di Pansus masih mempertimbangkan perlu tidaknya ratifikasi terhadap Protokol Madrid dalam jangka waktu dekat. Apakah juga masyarakat Indonesia, pelaku ekonomi kecil, menengah dan mikro sudah siap mandiri untuk menghadapi hal tersebut,” ungkapnya.

Jangan sampai, kemudian meratifikasi Protokol Madrid, kemudian persiapan masyarakat kita untuk menjadi kuat itu belum dilakukan.

Terkait sistem pendaftaran, DPR RI mendorong akan lebih dipermudah dan waktu pendaftaran akan lebih cepat, karena masih adanya keluhan dari pelaku usaha menenai sulitnya melakukan pendaftaran merek.

“Itu yang akan kami diskusikan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Kami sebagai wakil rakyat bersama Pemerintah bisa melaksanakan di lapangan yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha sehingga pelaku usaha mikro bisa mengakses pendaftaran merek dengan mudah, kalau perlu gratis dan tidak ada kendala-kendala yang berarti,” katanya.

Lebih lanjut, terkait penegakan hukum menjadi suatu yang sangat penting. Desy mengutarakan Indonesia merupakan masyarakat yang terbiasa dengan musyawarah untuk mufakat. Kalau hal itu bisa dilakukan dan kalau tidak perlu masuk ranah pengadilan yang memerlukan biaya yang besar bagi pelaku usaha, tentunya ini bisa dicarikan solusi yang lain.

“Ada beberapa alternatif solusi untuk penyelesaian sengketa juga akan kami diskusikan dalam RUU Merek ini,” katanya. (AS). FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

BULETIN PARLENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibrun Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto;

Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen; Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mujiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

INDONESIA HARUS PROTES KLAIM TIONGKOK ATAS LAUT CHINA SELATAN

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon mendorong Pemerintah Indonesia untuk memprotes keras klaim Tiongkok atas Laut China Selatan. Hal tersebut diungkapkannya baru-baru ini kepada wartawan di Senayan, Jakarta.

“Indonesia harus protes keras atas klaim dari Tiongkok atas Laut China Selatan. Kalau dibiarkan sangat membahayakan dan akan memicu konflik yang lebih panjang, dan secara material pun akan dirugikan,” tegas Fadli.

Oleh karena itu lanjut Fadli, ia berharap pemerintah tidak berdiam diri, agar tidak ada wilayah baik itu daratan dan lautan yang diakui atau diambil oleh negara lain. Dikatakannya, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk memprotes keras atas klaim itu.

Sengketa atas Laut China Selatan menurut Fadli semakin hari semakin berkembang serius, baik antara Tiongkok dengan Vietnam, Filipina, dan Jepang atas Shikoku Island. Dan belakangan konflik itu juga melibatkan Indonesia, ia berharap agar Indonesia bisa proaktif sebagaimana hakikat politik Indonesia yang bebas aktif,

“Jangan sampai hal ini dibiarkan saja, pemerintah harus minta penjelasan resmi kenapa wilayah maritim kita diklaim oleh Pemerintah Tiongkok. Bahkan sejatinya hal itu dapat dipertanyakan Presiden Indonesia kepada Xi Jinping, Presiden



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

negeri tirai bambu dalam acara pertemuan G20 itu,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini. (AYU)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

INDONESIA HARUS MAKSIMALKAN POTENSI ENERGI TERBARUKAN



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima cendekiawan ITB

Indonesia tidak akan bertahan mengandalkan energi fosil. Karena persediaan yang semakin menipis, sehingga nilai ekspor mineral dan ba-

tubara menjadi menurun. Bahkan, Indonesia telah menjadi importer, salah satunya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kita tidak dapat bertahan dengan kondisi ini terus, sehingga kita harus beralih ke *renewable energy*, yang belum kita garap secara maksimal,” kata Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Agus Hermanto, usai menerima beberapa cendekiawan Insititut Teknologi Bandung yang tergabung dalam Ametis Institute, di Gedung Nusantara III, Selasa (17/11/15).

Agus menilai, Indonesia memiliki banyak potensi sumber energi, namun belum dapat dimaksimalkan. Hal ini pun perlu diperkuat dengan dukungan DPR dalam hal perundang-undangan, agar Pemerintah memiliki landasan hukum dalam upaya memperkuat energi.

“Misalnya energi panas bumi. Sudah ada, tapi belum banyak. Tenaga air juga belum kita maksimalkan. Padahal, kemandirian energi akan memperkuat struktur ekonomi kita, struktur berbangsa dan bernegara kita juga semakin kuat, karena kita mempunyai sumber daya yang kuat,” tandas Agus.

Politikus F-PD itu menambahkan, dalam pertemuan juga dibahas masalah ekspor glondongan, atau minerba yang belum mengalami pemurnian, oleh perusahaan tambang asing, seperti Freeport dan Newmont. Padahal UU Minerba mengamanatkan agar perusahaan tambang tidak boleh ekspor bahan mentah, tapi harus yang sudah mengalami pemurnian.

“Sehingga ini jika dikaitkan dengan perusahaan tambang asing, yakni Freeport dan Newmont, tidak boleh

ekspor konsentrat lagi, harus mengalami pemurnian di *smelter*. Kedua perusahaan dari Amerika itu harus mempunyai *smelter*. Kalau Freeport, sudah mempunyai *smelter* di Gresik, walaupun ini skalanya belum memadai. Kami tetap mendorong agar Freeport membangun *smelter* di Papua. Sedangkan Newmont membangun *smelter* di NTB,” harap Agus.

Politikus asal dapil Jawa Tengah itu juga menambahkan, bahwa saat ini UU Minerba sudah masuk dalam Proleg-

nas 2015-2019 untuk segera di revisi.

“Saat ini, UU Minerba masuk dalam Prolegnas untuk di revisi. Kitapun akan melihat bagaimana perubahannya. Yang jelas amanat UU Minerba yang mewajibkan adanya *smelter*, adalah ide yang bagus,” dukung Agus, sembari mengatakan jika revisi UU Minerba dapat dilaksanakan dengan baik, akan banyak memberikan nilai tambah bagi Indonesia. (SF)/FOTO:DENUS/PARLE/IW.

INDONESIA-SWISS PROMOSIKAN INTERFAITH DIALOGUE



Ketua DPR Setya Novanto menerima Ketua Parlemen Swiss Mr. Claude Heche

DPR berpandangan kerja sama Indonesia dengan Swiss dalam mempromosikan *interfaith dialogue* perlu ditingkatkan. Hal itu perlu dilakukan, mengingat masih berkembangnya paham radikal yang mengatasnamakan agama dalam kehidupan masyarakat internasional.

“Peristiwa teror di Paris, Perancis, beberapa hari lalu tidak terlepas dari masih adanya paham radikal di tengah-tengah masyarakat,” kata Ketua DPR Setya Novanto ketika menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Swiss Claude Heche, di Gedung Nusantara III, Rabu (18/11/15).

Dalam kesempatan ini, Novanto didampingi Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin (F-PG) dan anggota Komisi IV DPR Syofwatillah Mohzaib (F-PD).

Novanto menambahkan, Indonesia dan Swiss, baik secara bilateral

maupun multilateral di forum-forum internasional, harus bekerja sama mencegah paham-paham radikal berkembang dalam kehidupan masyarakat internasional.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, lanjut Novanto, Swiss diundang dalam kapasitasnya sebagai anggota Uni Eropa (UE) untuk mendukung promosi ajaran Islam yang benar. Tren yang berkembang dari Islamophobia di negara-negara Eropa dapat meningkatkan ketegangan antara orang-orang Eropa.

“Oleh karena itu, penting untuk kita sadari bahwa terorisme adalah musuh bersama dan dihasilkan dari tatanan global yang tidak adil,” tandas Novanto.

Ditegaskan Novanto, DPR RI dan Parlemen Swiss juga harus menjadi bagian penting dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara. DPR RI dan Par-

lemen Swiss harus terus mendorong pemerintah masing-masing untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang.

Untuk mendukung penguatan hubungan bilateral, DPR RI telah membentuk sejumlah Group Kerja Bilateral Antar-Parlemen. Namun, Parlemen Swiss belum menjadi bagian dari kelompok ini.

“Pada kesempatan ini, saya mengusulkan wacana untuk membentuk kelompok persahabatan bilateral antar dua parlemen di parlemen masing-masing,” kata Novanto menambahkan.

Lebih lanjut, politikus F-PG itu mengatakan, hubungan bilateral Indonesia – Swiss yang sudah terjalin selama lebih dari 60 tahun sejauh ini telah berjalan dengan baik. Hubungan baik itu terlihat antara lain dari adanya kegiatan saling kunjung pejabat tinggi kedua negara.

Hal itu diperkuat dengan kunjungan mantan Presiden Swiss ke Indonesia, Doris Leuthard, pada bulan Juli 2010 lalu. Sementara, Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah berkunjung ke Swiss pada bulan Juni 2011, sekaligus menghadiri konferensi PBB di Jenewa.

Sementara dari sisi parlemen, anggota DPR RI juga kerap mengunjungi Swiss, khususnya ke Jenewa untuk menghadiri sidang-sidang parlemen yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU).

“Hubungan baik Indonesia – Swiss juga terlihat di bidang perdagangan dan investasi. Nilai total perdagangan kedua negara pada tahun 2014 mencapai nilai 761 juta dollar AS, dan investasi Swiss di Indonesia menempati

urutan ke-13 pada periode 2010 – 2014 dengan total investasi sebesar 669 juta dollar AS,” jelas Novanto.

Politikus asal dapil NTT itu menambahkan, DPR juga mengapresiasi pencapaian kerja sama kedua negara

dan kontribusi perusahaan Swiss di Indonesia seperti Nestle, Holcim dan lain-lain terhadap sektor industri di Indonesia.

DPR juga mengapresiasi berbagai bentuk bantuan Swiss kepada Indone-

sia, terutama untuk mendukung program pembangunan lingkungan hidup, program peningkatan kapasitas SDM di bidang Peace Building, HAM dan demokrasi, serta program pengembangan sektor UKM. (SF,MP)/FOTO:JAKA/PARLE/HR

SETYA NOVANTO TANGGAPI PENGADUAN MENTERI ESDM KE MKD

Pasca namanya disebut oleh Menteri ESDM sebagai orang yang mencajut nama Presiden dan Wapres terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi, khusus untuk masalah Freeport. Oleh karena itu pihaknya tidak akan membawa nama Presiden, karenanya harus berhati-hati dalam menyampaikan segala hal yang telah Presiden sampaikan kepada saya, demi kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Papua.

Setya menuturkan, sehubungan dengan masalah Freeport, ia tidak pernah bertemu secara khusus dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

“Silakan tanya kepada pak Sudirman, karena saya tidak pernah melakukan pertemuan secara khusus dengan pak Sudirman, dan apa yang telah di-

laporkan kepada MKD, adalah hal yang wajar dan sah-sah saja,” ungkap politisi Golkar ini kepada wartawan di Gedung DPR Selasa (17/11/2015).

Ketika ditanya, apakah benar ia pernah bertemu dengan pihak PT Freeport dan adanya permintaan Saham dengan PT Freeport. “Silakan tanya kepada Sudirman Said, mengenai meminta saham, saya kira dalam hal ini, harus sangat hati – hati dan saya sangat memperhatikan kode etik baik di Indonesia dan Amerika Serikat atau di perusahaan Amerika dimanapun juga, karena pihak Duta Besar selalu mengingatkan, untuk memberikan saham – saham itu tidak lah gampang harus sangat hati-hati, dan apapun itu harus dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan,” tandasnya.

Terkait dengan kinerja dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Setnov menandakan, ia tetap berkon-



Ketua DPR RI Setya Novanto

sentris sebagai Pimpinan DPR. “Sejak awal, saya sangat menghargai MKD, karena mereka sudah mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalankan secara baik,” tegasnya. (AS)/FOTO:JAKA/PARLE/IW.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

LEMBAGA DPR TAK SEMESTINYA DIATUR EKSEKUTIF

Sebagai lembaga legislatif, idealnya DPR tidak diatur dan tunduk pada aturan eksekutif. Pengaturan yang dimaksud adalah mulai rekrutmen pegawai, aturan administrasinya, hingga hasil kerjanya yang memang dikelola secara independen oleh DPR.

Berbeda dengan kantor kementerian yang dipimpin oleh satu menteri. Semua stafnya baik di pusat dan daerah tunduk pada aturan satu pimpinan. Di DPR ada 560 anggota dari beragam fraksi dan beragam pula buah pikiran-

nya. Untuk itu, DPR butuh pengelolaan tersendiri baik secara administratif maupun keahlian.

Karena di DPR ada tiga fungsi, baik legislasi, pengawasan, dan anggaran, maka DPR harus menghidupkan tradisi ilmiah untuk memperkuat kelembagaan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Selasa (17/11), mengemukakan hal ini saat membuka seminar nasional di DPR dengan tajuk “Format Ideal Pemberian Dukungan Keahlian Kepada DPR RI”.

Fahri kembali menegaskan bahwa sistem birokrasi di DPR adalah birokrasi otak yang mengelola beragam pikiran dari 560 anggotanya. “Independensi DPR masih belum kuat, karena sistem birokrasinya masih menginduk ke eksekutif,” tandas Fahri. Sistem kepegawaiannya masih diatur oleh Kementerian PAN dan RB. Padahal, idealnya DPR punya sistem birokrasi kepegawaian sendiri, karena ranah pekerjaannya memang berbeda dengan pekerjaan di pemerintahan.

Bahkan, Kepala Badan Keahlian DPR Jhonson Rajagukguk mengusulkan agar nama PPPK diubah kepanjangannya menjadi Pegawai Parlemen dengan Perjanjian Kerja. Bukan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja seperti nama resminya dalam UU ASN. Wacana pembeda antara wilayah kerja legislatif dan eksekutif harus terus dilakukan agar masyarakat mengerti tentang kewenangan dan independensinya masing-masing.

Jhonson menjelaskan, Badan Ke-

ahlian DPR yang baru saja dibentuk memiliki lima pusat kajian untuk mendukung kinerja DPR menuju parlemen modern. Kelimanya adalah pusat perancangan, pusat pemantauan, pusat kajian anggaran, pusat kajian akuntabilitas keuangan negara, dan pusat penelitian. Badan ini, lanjut Jhonson, sudah memiliki dasar hukum berupa Perpres N.27/2015 tentang Sekjen DPR dan Badan Keahlian DPR RI. (MH), FOTO : ANDRI/PARLE/HR.

FADLI ZON ANGGAP MENTERI ESDM LAKUKAN MANUVER POLITIK

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon menilai apa yang dilakukan Menteri ESDM (Energi dan sumber daya mineral) Sudirman Said terkait adanya “Politisi kuat” yang mencatat nama Presiden dan Wapres untuk mendapatkan saham di PT Freeport merupakan manuver politik untuk tujuan tertentu.

“Saya sendiri belum tau apa yang dilaporkan Sudirman ke MKD (Mahkamah kehormatan dewan). Terkait PT Freeport, justru Kementerian ESDM lah yang selama ini memberikan banyak keluasan pada PT Freeport. Dimana ada Undang-Undang yang mengharuskan perusahaan yang ingin ekspor harus memiliki *smelter* bahan baku. Sementara PT Freeport belum memiliki *smelter* sudah diberikan kemudahan untuk ekspor, ini berarti Menteri ESDM melanggar undang-undang. PT Antam saja yang murni milik Indonesia harus punya *smelter* untuk ekspor, tapi kenapa Sudirman Said memberikan kemudahan Freeport untuk ekspor. Ini merugikan negara,” jelas Fadli Zon kepada wartawan yang menemuinya di loby Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Senin (16/11).

Fadli menambahkan PT Freeport termasuk perusahaan asing yang cukup lama berinvestasi di Indonesia, kontraknya pun berakhir pada tahun 2021 mendatang. Menurut ketentuan, perpanjangan kontrak baru itu dilakukan dua tahun sebelum berakhirnya kontrak, artinya tahun 2019 baru ada pembicaraan tentang kontrak, dan itu tentu masih lama.

Jika kemudian, Sudirman Said me-



Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat diwawancara wartawan

ngatakan memiliki rekaman yang berisi pembicaraan antara “politisi kuat” yang dimaksud itu sejak bulan Juli, Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini mempertanyakan kenapa baru sekarang hal itu diungkapkannya. Oleh karena itu ia menduga Sudirman tengah melakukan manuver politik untuk menutupi sesuatu atau tujuan tertentu.

“Kalau dikatakan ada rekamannya, juga melakukan tindakan pidana yang merekamnya. Dan jika Sudirman Said ini mempergunakannya ini juga bisa dilaporkan karena menyebarluaskan dan bentuknya fitnah. Oleh karena itu ia menilai Sudirman bisa segera dilaporkan ke polisi oleh pihak-pihak

yang namanya ikut disebut-sebut Sudirman. Rekaman itu katanya sudah ada sejak bulan Juli, kenapa baru sekarang (November) diungkapkan,” jelas Fadli.

Sementara itu, terkait manuver politik yang dimaksud Fadli, sempat beredar kabar jika Sudirman termasuk dalam daftar nama-nama menteri yang akan *direshuffle*, namun ia enggan mengomentari hal itu lebih jauh.

“Ya bisa saja itu jadi manuver politik dia. Selama ini dia (Sudirman-red) juga termasuk menteri yang tidak berprestasi. *Lifting oil* kita selama ini juga biasa-biasa saja. Ya perlu dievaluasi lah ini,” tegasnya. (AYU), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.

MKD HARUS JAGA KEPERCAYAAN PUBLIK

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saat ini memiliki peran penting untuk menegakkan kehormatan dan marwah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara. Masyarakat termasuk anggota DPR sangat berharap Alat Kelengkapan Dewan ini dapat mengemban tugasnya, terutama memeriksa pengaduan Menteri ESDM sesuai prosedur dan adil.

“Kita beri kesempatan kepada MKD untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik tersebut secara prosedural, adil dan kemudian umumkan hasilnya secara terbuka kepada publik. Dengan cara itu DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik,” kata anggota Komisi IV Almuzzammil Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/15).

Ya menambahkan pembentukan MKD adalah bentuk dari kesadaran dari anggota DPR tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran etik oleh oknum. Publik diharapkan dapat menantikan proses pemeriksaan yang akan dilakukan untuk membuktikan ada atau tidak pelanggaran etik.

“Siapa pun yang melanggar harus diproses di MKD dan selama ada bukti kuat pasti ada sanksi yang terukur,” tegas Muzammil yang pada periode sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR.

Secara khusus ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Sudirman Said yang telah melaporkan oknum anggota DPR yang diduga telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di tengah proses negosiasi perpanjangan kontrak karya PT Freeport.



Anggota Komisi IV DPR Almuzzammil Yusuf

“Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemberantasan mafia energi dan migas yang jelas merugikan rakyat. Kita dukung Menteri ESDM karena pengaduan ini sudah sesuai UU MD3, apalagi laporan ini dilakukan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya,” pungkas Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini. (IKY) FOTO: IBNUR/PARLE/HR

MKD SEGERA VERIFIKASI LAPORAN MENTERI ESDM



Pimpinan MKD DPR menerima Menteri ESDM

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) segera menindaklanjuti laporan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota dewan. Langkah pertama setelah menerima pengaduan adalah MKD akan melakukan verifikasi

yang sesuai tata tertib berlangsung selama 14 hari.

“Laporan sudah kita terima dari Menteri ESDM dan selanjutnya kita minta tenaga ahli MKD untuk mempelajari dan lakukan verifikasi. Prosesnya 14 hari setelah hari ini, barulah kita mengambil sikap,” kata Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/15).

Politisi Fraksi PDIP ini menolak menjelaskan lebih jauh tentang dugaan kode etik yang dilanggar serta data oknum anggota dewan tersebut. Pada saat menyampaikan laporan menurutnya Menteri ESDM memaparkan kronologis pertemuan oknum tersebut dengan Pimpinan PT Freeport dan upaya untuk mendukung perpanjangan kontrak karya pertambangan di Papua.

“Saya tadi juga meminta agar bukti dilengkapi dengan rekaman percakapan pertemuan pada bulan Juni tahun ini, katanya ada dan akan diserahkan. Tadi dijelaskan anggota dewan itu didampingi oleh seorang pengusaha yang cukup terkenal,” lanjut Junimart yang pada saat itu didampingi dua Wakil Ketua yaitu Hardisoesilo (FPG) dan Sufmi Dasco Ahmad (FP. Gerindra).

Sementara itu dalam keterangan pers usai bertemu Pimpinan MKD, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan menaruh harapan besar bahwa lembaga penegak kehormatan DPR ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sesuai UU no.17/2014.

“Saya berpendapat seorang anggota DPR yang terhormat menjanjikan suatu cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan Negara Republik Indonesia, seraya meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik adalah tindakan yang tidak patut dilakukan,” demikian Sudirman. (IKY)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

Pemerintah Diminta Segera Serahkan Bahan Tertulis Belanja APBN 2016



Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2015-2016

DPR mengingatkan kepada Pemerintah untuk segera menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan dalam APBN Tahun Anggaran 2016, sebelum pelaksanaan anggaran dimulai. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pengesahan APBN TA 2016 oleh DPR, pada persidangan yang lalu.

Demikian disampaikan Ketua DPR Setya Novanto, saat membacakan pidato pembukaan masa persidangan II, tahun sidang 2015-2016, di Gedung Nusantara II, Senin (16/11/15). Hal ini

juga sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

“Penyerahan bahan tertulis tersebut diperlukan agar DPR meyakini bahwa Pemerintah telah menerjemahkan besaran anggaran di dalam APBN ke dalam jenis-jenis belanja dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan,” kata Novanto.

Politikus F-PG itu menegaskan, hal ini penting dilakukan dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan DPR

terhadap kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan anggaran negara.

Selain itu, DPR mengharapkan kesiapan aparat Pemerintah Kabupaten dan Aparat Desa dalam mengelola Dana Desa. Apalagi, peningkatan alokasi anggaran untuk Dana Desa cukup perhatian dalam pembahasan APBN TA 2016.

“DPR juga mengharapkan Dana Desa ini menjadi prioritas, mengingat dana tersebut dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di desa, sehingga dapat mendorong pengembangan ekonomi rakyat,” imbuh Novanto.

Masih terkait dengan APBN TA 2016, yang syarat akan berbagai catatan dari Fraksi-Fraksi, DPR mengingatkan agar catatan-catatan tersebut harus menjadi perhatian dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah.

“Hal ini tidak lain karena DPR ingin memastikan bahwa alokasi anggaran harus untuk kepentingan rakyat banyak yang berimplikasi besar dan cepat bagi kesejahteraan rakyat,” pesan politikus asal dapil NTT itu.

Sementara terkait APBN TA 2015, lanjut Novanto, DPR mengingatkan kepada Pemerintah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran Kementerian atau Lembaga atas APBN Tahun Anggaran 2015. Apalagi, pelaksanaan anggaran sudah memasuki akhir tahun. (SF)/FOTO:NAEFURUDJI/PARLE/IW.

DIPLOMASI PARLEMEN PENTING BANTU PEMERINTAH

Berkaitan dengan peran diplomasi parlemen, pada Masa Persidangan II ini, DPR akan menugaskan delegasi untuk berpartisipasi pada Pertemuan *United Nation Climate Change Conference* di Paris, Perancis tanggal 5 dan 6 Desember 2015. Selain itu, DPR juga akan mengirim Delegasi pada *the 8th Asian Parliamentary Assembly Plenary Session* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 8 sampai dengan 11 Desember 2015.

Ketika menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan II tahun 2015/2016, Senin (16/11) Ketua DPR mengemukakan, partisipasi DPR di forum internasional tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional yang menjadi agenda pembahasan dalam sidang-sidang tersebut.

Dalam rangka penguatan hubungan bilateral, Pimpinan DPR



Ketua DPR RI Setya Novanto

akan melakukan kunjungan muhibah ke Filipina, Belgia, dan Polandia. Sebelumnya, pada masa reses, Pimpinan DPR telah melakukan kunjungan muhibah ke Jepang dan menerima kunjungan tamu dari negara sahabat, diantaranya Presiden Italia dan Duta Besar Jepang.

Dalam kunjungan Pimpinan DPR ke Jepang pada masa reses yang lalu, Pimpinan telah bertemu dengan Ketua Parlemen, Kaisar Jepang, dan Perdana Menteri serta sejumlah tokoh di Jepang. Dalam waktu dekat akan ada kunjungan balasan dari Parlemen Jepang yang akan disertai dengan sejumlah pengusaha. “Hal ini menunjukkan betapa pentingnya diplomasi parlemen dalam membantu Pemerintah,” pungkas Novanto.

(MPI)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

Pada Masa Persidangan II tahun 2015/2016 ini, DPR akan membahas dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Capim KPK).

Hal itu dikatakan Ketua DPR Setya Novanto saat membuka masa persidangan II tahun 2015/2016 di depan Rapat Paripurna, Senin (16/11). Menurut Novanto, DPR juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, serta memberikan pertimbangan kepada Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Seychelles dan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia.

Di bidang legislasi, lanjut DPR akan menyelesaikan pembentukan beberapa RUU yang menjadi prioritas di tahun 2015. Adapun RUU yang sedang dalam tahap penyusunan adalah RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Perbankan, RUU tentang Perubahan UU tentang Bank Indonesia, dan RUU tentang Penyiaran.

RUU yang dalam tahap harmonisasi adalah RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Kebudayaan. RUU yang akan diselesaikan dalam proses pengajuannya adalah RUU tentang Pertembakauan.

Sedangkan RUU yang akan dilakukan pembahasan dan saat ini masih menunggu Surat Presiden adalah RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan RUU tentang

DPR SEGERA UJI KELAYAKAN CAPIM KPK



Suasana Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2015-2016

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

DPR juga akan mempercepat proses pembahasan atas RUU tentang Merek, RUU tentang Paten, RUU tentang Minuman Beralkohol, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Mengingat singkatnya Masa Sidang Kedua ini dan masih banyaknya RUU yang harus diselesaikan, Pimpinan menghimbau agar proses penyusunan, harmonisasi, dan pembahasan RUU harus dioptimalkan, dengan penggunaan jadwal sidang yang efektif,” tegas dia.

Pimpinan DPR mengingatkan Badan Legislasi untuk segera melakukan pembahasan Prioritas Prolegnas Tahun 2016 bersama Pemerintah. Penetapan Prolegnas sebaiknya didasarkan pada urgensi untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat. RUU yang perlu dimasukkan di dalam Prioritas Prolegnas Tahun 2016, antara lain RUU tentang Perubahan UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang *Tax Amnesty*, RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia, RUU tentang Pemilihan Umum, dan RUU tentang Partai Politik. (MPI)/

FOTO:ANDRI/PARLE/HR

DPR DUKUNG UPAYA INTERNASIONAL PERANGI TERORISME

DPR berharap peristiwa memilukan berupa serangan teror di Paris, Perancis tidak terjadi lagi di masa mendatang. DPR perlu terus mendukung upaya internasional memerangi terorisme.

Demikian ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto ketika membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan II tahun 2015/2016 di Gedung DPR, Senin (16/11).

“Pimpinan, atas nama seluruh Anggota DPR, menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas peristiwa serangan teror yang terjadi di Paris, Perancis, Jumat malam lalu, yang telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 150 orang,” ungkap Setya Novanto.

Menurut politisi Golkar ini, sebuah peristiwa keji yang patut dikecam oleh dunia internasional karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai kema-



Ketua DPR RI Setya Novanto

nusiaan juga ajaran agama mana pun di dunia ini.

Peristiwa ini lanjut Novanto, juga menunjukkan bahwa aksi teror masih terus mengancam kehidupan masyarakat internasional. “DPR sudah tentu berharap peristiwa memilukan ini tidak terjadi lagi di masa datang, dan kita perlu terus mendukung upaya internasional memerangi terorisme,” katanya menambahkan.

Di bagian lain, Pimpinan Dewan juga menyinggung akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Langsung secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015. DPR mengingatkan kepada Pemerintah dan para penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah untuk mempersiapkan setiap tahapan proses pemilihan tersebut dengan baik agar pelaksanaannya berlangsung aman dan tertib. (MPI)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

RUU JPSK DIHARAPKAN SELESAI TAHUN INI

Memasuki Masa Persidangan II Tahun 2015/2016, Komisi XI DPR langsung mengebut pembahasan Rancangan Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Sebagai langkah awal, Komisi Ekonomi langsung mengundang pihak Pemerintah, untuk mengetahui sikap Pemerintah terhadap RUU ini.

Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad, usai rapat mengatakan, enam fraksi sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM), sementara sisanya akan segera menyusul. Rapat kali ini, Pemerintah diwakili oleh Kementerian Keuangan yang diwakili Wamenkeu Mardiasmo dan perwakilan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Agenda rapat hari ini adalah pengumpulan inventaris masalah (DIM) RUU JPSK. Kami ingin adanya payung hukum dalam kondisi ekonomi yang serba tak pasti seperti sekarang ini,” kata Fadel, di Gedung Nusantara I, Rabu (18/11/15).

Politikus F-PG ini menambahkan, dalam DIM yang sudah diserahkan fraksi, berbagai pandangan sudah dilampirkan. Ada yang memberikan ma-

sukan di antaranya urgensi presiden harus mengambil peran dalam penetapan krisis. Selanjutnya, Komisi XI DPR pun mendorong untuk dibahas lewat panitia kerja (panja).

“Masing-masing fraksi sudah menyampaikan apa saja *concern*-nya. Setelah ini, akan dilakukan konsinyering untuk bahas pasal per pasal,” kata politikus asal dapil Gorontalo itu.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR, I Gusti Agung Rai Wijaya (F-PDI Perjuangan) berharap, dengan adanya UU ini, setiap keputusan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dapat diatur, dan lebih tegas dalam pengambilan keputusan.

“Keputusan dari KKSK itu untuk kepentingan bangsa. Sehingga, jangan memutuskan dulu, baru dipikirkan. Perlu pertimbangan dari sisi fiskal, moneter, maupun perbankan. Kita dapat mencegah terjadinya krisis yang dulu pernah terjadi,” kata politikus asal dapil Bali itu.

Anggota Komisi XI DPR, Johnny G Plate (F-Nasdem) dan Misbakhun (F-PG) berharap RUU ini diselesaikan sebelum



Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad

tahun 2016 berakhir.

Dari pihak pemerintah, Mardiasmo pun setuju pembahasan RUU JPSK dilanjutkan pada pembicaraan tingkat pertama dan setuju pembentukan panja. Dorongan dari beberapa fraksi agar RUU JPSK dapat dikebut pembahasannya supaya disahkan sebelum 2016. (SF)/FOTO:JAKA/PARLE/IW.

PROSES SELEKSI CAPIM KPK BELUM SESUAI UU

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa hal belum memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal seharusnya, dalam menjalankan tugasnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) merujuk kepada UU tersebut.

Masinton menilai, masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan capim, termasuk lamanya waktu masa pendaftaran yang semestinya 14 hari berturut-turut tapi kemudian diperpanjang. "Calon Pimpinan KPK ini memang belum memenuhi persyaratan dan ini yang menjadi pertanyaan di Komisi III DPR, termasuk belum adanya unsur dari Kejaksaan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansel Capim KPK di gedung Nusantara II DPR Ja-

karta Rabu (18/11) malam.

Politisi F-PDIP ini mengatakan, karena beberapa alasan tersebut, Komisi III akan melakukan pendalaman, apapun keputusannya nanti akan dibawa ke dalam rapat pleno Komisi dan selanjutnya akan dibawa dalam Rapat Paripurna apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak.

"Komisi III DPR pastinya akan mendalami tentang visi dan misi Pansel KPK, sebab seharusnya mereka berkoordinasi dengan Mabes Polri, dengan BIN, maupun Kejaksaan. Nantinya jangan sampai di tengah jalan ada kasus-kasus kecil yang sebelum menjadi Pimpinan KPK, kemudian dikorek-korek kembali maka Komisi III DPR menginginkan harus *clear* dari sekarang," jelas Masinton.

Komisi III DPR, lanjut dia, juga akan mendalami masalah anggarannya, karena ini menggunakan APBN maka keterlibatan organisasi-organisasi sipil mana saja dan nantinya bentuk per-



Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu

tanggungjawabannya seperti apa perlu ditelusuri secara jelas.

Ditambahkan Masinton, uji kelayakan Capim KPK rencananya dilakukan bulan ini antara tanggal 25 atau 26 November. Pihaknya juga ingin memastikan, sebelum uji kelayakan Capim KPK, proses seleksinya betul-betul sudah memenuhi ketentuan UU sehingga tidak memunculkan masalah di kemudian hari. (SPY,MP) FOTO: NAEFU-ROJI/PARLE/HR

DELEGASI BKSAP DPR KAGUMI TCDC



Delegasi BKSAP DPR menggelar pertemuan dengan Parlemen Thailand

Sejumlah anggota BKSAP DPRRI mengunjungi Thailand Creative Design Center (TCDC) di Kota Bangkok, Thailand Rabu (18/11), sebagai salah satu

upaya untuk mempelajari kesiapan negara tetangga dalam menyambut pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sasaran utama yang ingin dicapai me-

lalui kunjungan ini adalah penyusunan rekomendasi pengembangan sektor industri kreatif untuk meningkatkan daya saing nasional.

Menurut Ketua Delegasi BKSAP DPR Andika Pandu Puragabaya, di Indonesia, ide untuk mengembangkan ekonomi kreatif mulai mengemuka sejak tahun 2005, yaitu saat Presiden SBY menyampaikan pentingnya pengembangan sektor ekonomi kreatif dalam pembukaan INACRAFT. Badan Ekonomi Kreatif di Indonesia juga baru saja didirikan tahun ini.

Sementara itu, Thailand sudah menempatkan pengembangan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional 2012-2016. TCDC didirikan sebagai salah satu sarana edukasi yang menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung sektor industri kreatif, yaitu ruangan eksibisi, ruangan seminar, perpustakaan, pusat riset, dan pusat data material desain.

Pengunjung TCDC dapat melakukan riset desain dari berbagai aspek,

seperti Material, Tekstil, Peralatan, Teknologi Digital, dan Pengembangan Keahlian. Ribuan literatur dan inspirasi untuk keperluan riset dapat diperoleh dari perpustakaan desain yang sangat nyaman bagi para pengunjung. Untuk mengakses perpustakaan, biaya keanggotaan yang diberlakukan adalah 640 Baht atau sekitar 250 ribu rupiah per tahun untuk mahasiswa, dan 1200 Baht atau sekitar 500 ribu rupiah per tahun untuk para profesional.

“Konsep TCDC ini patut kita contoh. Saya rasa kita belum memiliki tempat studi desain yang komprehensif seperti ini,” ujar Indra Hananto, politisi Golkar

yang turut serta dalam kunjungan tersebut. “Ide dasarnya sederhana, tapi diimplementasikan di Bangkok dengan baik. Salah satu masalah yang sering kita hadapi di Indonesia adalah proses eksekusinya,” tambahnya.

TCDC Bangkok juga telah mendirikan Material ConneXion, yaitu tempat yang menyediakan sekitar 7.500 koleksi bahan/material desain. Material ConneXion Bangkok merupakan pusat basis data material satu-satunya yang berada di Asia Tenggara. Basis data tersebut juga dapat diperoleh secara online dengan biaya 250 USD per tahun. Saat ini, ada kurang lebih 7.000 anggota yang

terdaftar sebagai pengguna, termasuk perusahaan ternama seperti BMW dan Estee Lauder.

Selain menyediakan fasilitas riset, TCDC juga kerap memperkenalkan konsep keberlanjutan pada penggunaan material desain, salah satu contohnya adalah bahan leather yang terbuat dari daun palem, dan kebetulan berasal dari Indonesia. Bahan lainnya yang dapat digunakan atau dibentuk menjadi material leather adalah jamur. Apabila diolah dengan baik, keduanya akan memiliki tekstur yang sangat mirip dengan material kulit sapi/kambing. (BKSAP, MP) DOK.

BKSAP/PARLE/HR

KECELAKAAN KAPAL BUKTI KETIDAKPROFESIONALAN PEMERINTAH

Kecelakaan kapal yang menimpa Kapal Motor (KM) Wihan Sejahtera, Senin pagi (16/11), merupakan bukti ketidakprofesionalan pemerintah dalam mengelola pelabuhan dan izin kapal. Termasuk tidak profesional dalam mengelola ekosistem laut dari pencemaran tumpahan minyak.

Banyak kementerian yang bisa dipersalahkan dalam kecelakaan kapal di perairan Teluk Lamong, Jatim itu. Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Lingkungan Hidup harus bertanggung jawab atas dampak kecelakaan tersebut. UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.17/2008 tentang Pelayaran juga banyak dilanggar oleh perusahaan pelayaran yang mengangkut penumpang dari Tanjung Perak ke Labuan Bajo ini.

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (dapil Jatim I), mengungkapkan, banyak temuan pelanggaran baik yang dilakukan perusahaan pelayaran maupun kementerian terkait. KM Wihan Sejahtera ternyata tidak memiliki sertifikat kelas, sebagai bukti lulus penilaian konstruksi dan kelengkapan dari Kemenhub seperti diamanatkan UU Pelayaran.

“Harusnya saat didaftarkan ada selektifitas yang ketat untuk menilai kelayakan kapal. Semua kapal yang berlayar di Indonesia wajib masuk kelas,” ujar Bambang di ruang kerjanya, Rabu (18/11). Temuan lainnya adalah, para penumpang tidak mendapat klaim asuransi atas mobil miliknya yang ikut tenggelam.



Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono

Padahal itu hak para penumpang. Saat terjadi kecelakaan, Basarnas juga tak bergerak cepat mengevakuasi para penumpang.

“Banyak keluhan dari para penumpang, termasuk kerugian kendaraan pasca-kecelakaan kapal. Mereka tidak diberikan pelayanan dan evakuasi tidak dilakukan dengan baik, karena penumpang tidak diberikan jaket keselamatan (pelampung). Tidak ada instruksi harus lari ke mana. Korban kocar-kacir. Untung kecelakaan terjadi di alur Surabaya Barat atau dekat alur Gersik di Teluk Lamong. Kalau terjadi di tengah laut mungkin banyak korban jiwa berjatuhan,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, perusahaan pelayaran pemilik KM Wihan itu tidak punya kompetensi di bidang transportasi terutama manajemen keselamatan pelayaran. Selain melanggar UU Konsumen, perusahaan tersebut

juga melanggar UU Pelayaran. “Kesalahannya berlipat-lipat begitu banyak,” nilai Bambang. Belum lagi, tumpahan minyak dari kapal yang mencemari laut juga tidak ditangani Kementerian Lingkungan Hidup.

Pencemaran ekosistem laut luput dari perhatian pemerintah. Ada sekitar 100 ton BBM di dalam kapal. Mestinya bisa segera dilakukan pencegahan pencemaran laut dengan menggunakan *oil boom*, yaitu alat untuk melokalisir tumpahan minyak di laut. Dikemukakan Bambang, laut di Teluk Lamong memang sudah tercemar. “Setelah dicek memang tidak ada *oil boom* dan laut di sana bau minyak. Mestinya begitu ada kapal terbalik, tugas pemerintah untuk melindungi dari pencemaran.”

Sementara itu, soal penyebab kecelakaan kapal hingga kini belum jelas. KNKT sendiri masih menginvestigasi kronologi kecelakaan. Kesaksian penumpang kapal sebelum tenggelam menyebutkan, sempat ada suara benturan keras. Ini menimbulkan dugaan kapal menabrak benda keras. Kesaksian lain menyebutkan, kapal kelebihan penumpang.

Bambang menilai, titik kecelakaan KM Wihan jauh dari lokasi bangkai kapal atau karang besar. Jalur pelayarannya cukup lebar. Jadi megherankan bila terjadi benturan. Di perairan tersebut, sambung Bambang, memang banyak bangkai kapal peninggalan perang. Tapi, rambu-rambu laut sudah terpasang. “Tugas pemerintah mengangkat bangkai tersebut, sehingga perairan kita bersih

dan tidak membahayakan.”

Seperti diketahui, saat terjadi kecelakaan, lunas (bagian terbawah) KM Wihan bocor. Inilah yang menguatkan dugaan kapal menabrak benda keras di laut dangkal. Sementara keterkaitan-

nya dengan Pelindo III sebagai operator pelabuhan, hanya sebatas operasional pandu. Setiap kapal, tutur Bambang, harus punya pandu yang membawa kapal dari pelabuhan ke luar alur.

“Pandu itu dari Pelindo III. Saya belum

tahu, apakah kapal itu sudah dipandu benar atau dia memang tidak memanggil pandu. Kalau tidak memanggil pandu, tambah salah lagi, karena melanggar UU Pelayaran,” papar Bambang lebih lanjut.

(MH)/FOTO:NAEFURODJI/PARLE/IW.

PANSUS PELINDO II KEDEPANKAN FAKTA DAN DATA

Fakta dan data menjadi bukti penting dalam penyelidikan dan penyidikan atas sebuah skandal. Kesimpulan dan putusan yang tepat didasarkan pada fakta dan data yang akurat. Inilah yang sedang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI.

Wakil Ketua Pansus Pelindo II Aziz Syamsuddin (F-PG) menyampaikan hal tersebut sesaat sebelum mengikuti rapat Pansus, Rabu (18/11). Rapat yang dipimpin Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) itu, menghadirkan tiga lembaga konsultan keuangan, yaitu Bahana Sekuritas, Deutch Bank, dan Finance Research Institute (FRI). Ketiganya pernah menjadi konsultan bagi Pelindo II.

Fakta dan data dari ketiga lembaga ini sangat dibutuhkan oleh Pansus untuk saling mengkonfrontir data mana yang sesungguhnya sangat valid atas neraca keuangan dan data proyek Pelindo II. Dari ketiganya pula akan diketahui penyelewengan yang telah dilakukan oleh Direksi Pelindo II.

“Hari ini pengambilan data dari Deutch Bank, FRI, dan Bahana dalam melakukan audit di Pelindo II. Pansus mengedepankan fakta dan data. Kita tunggulah sampai data akuratnya terkumpul,” ujar Aziz.

Sementara itu, dalam rapat tersebut, Rieke menegaskan, kehadiran ketiga lembaga ini penting agar tak saling mengklaim datanya yang paling benar. Ada tiga proyek besar di Pelindo II yang ditangani ketiga konsultan keuangan terse-



Pimpinan Pansus Angket Pelindo II

but, yaitu proyek konsesi Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT), Global Bond, dan Proyek New Priok. (MH), FOTO : NAEFURODJI/PARLE/HR.

KETUA DPR TAK PERNAH KELUARKAN SURAT KATABLECE KE DIRUT PERTAMINA



Kebag. Tata Usaha Sekretaris Ketua DPR YOI Tahapari

Kepala Bagian Tata Usaha Sekretaris Ketua DPR YOI Tahapari, di ruang wartawan, Rabu (18/11) menggelar jumpa pers berkaitan beredarnya surat palsu Ketua DPR kepada Dirut Pertamina. Surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Ketua DPR dan tidak pernah dilihatnya. Kop suratnya juga sangat berbeda sebagaimana yang dikeluarkan DPR.

Menurut Tahapari, dalam surat palsu tersebut, lambang DPR-RI berada di tengah, padahal lambang DPR yang resmi dalam kop surat DPR selalu berada di sebelah kiri. Kop surat resmi itulah yang selalu digunakan Ketua DPR dalam surat menyurat. “Sebagai Kepala Bagian TU Ketua DPR, saya menyatakan surat itu tidak benar atau palsu dan kami tidak pernah mengeluarkan surat ini,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan pers Tahapari mengaku selaku pegawai yang mengurus administrasi Ketua DPR selalu mencatat surat masuk maupun keluar. Sehingga kalau ada

kejadian pemalsuan seperti ini tentu tidak pernah ada di sekretariat Ketua DPR. “Kami juga heran sampai ada surat palsu seperti ini dan mengatasnamakan Ketua DPR. Asalnya dari mana kami juga tidak tahu. Karena itu, tugas kami meluruskan bahwa sekretariat TU Ketua DPR tidak pernah mengeluarkan surat ini,” ujarnya lagi.

Ditambahkan, selaku Kabag TU Ketua DPR dirinya tahu surat mana yang keluar dan tercatat secara administrasi dan Ketua DPR tidak pernah mengeluarkan surat tanpa dicatat oleh pegawai Sekretariat TU Ketua DPR.

Sebagaimana diberitakan, beredar surat pengantar dari pejabat atau katebecele atas nama Ketua DPR Setya Novanto

ke Dirut Pertamina soal penyimpanan BBM. Surat tak bernomor itu beredar di media sosial. Ada kop lambang DPR di bagian atas surat bertanggal 17 Oktober 2015 itu. Di bawah lambang itu tertulis “Drs Setya Novanto Ketua DPR-RI”. Surat ditujukan ke Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

Ketua DPR Setya Novanto sudah membantah pernah mengirim surat ke Pertamina terkait penyimpanan BBM. Soal kop DPR yang ada di surat itu, Novanto menduga dibuat oleh orang lain. “Saya tidak pernah merasa membuat dan mengirim surat ke Pertamina,” kata Novanto. (JK,MP)/FOTO:JAKA/PARLE/IW.

KOMISI III BAHAS PROSES SELEKSI CAPIM KPK

Komisi III DPR rencananya akan mengundang Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Selasa (17/11) malam. Pansel diundang sebelum proses seleksi Capim KPK dilanjutkan.

“Hasil Pansel kita akan lihat persyaratan-persyaratan tersebut akan ditindaklanjuti masuk *fit and proper test* atau bagaimana tanggapan (Pansel),” kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Sayangnya, Komisi III belum memiliki jadwal kapan *fit and proper test*. Proses baru bisa berjalan ketika Komisi III sudah diamanahi Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Sementara sistem pemilihan akan dilakukan dengan sistem *one man one vote*.

Aziz tak berani menjanjikan proses ini bisa diselesaikan Desember mendatang. “Kita lihat perkembangan, karena tidak berani janji selesai atau tidak selesai,” tandas Aziz.

Sementara anggota Komisi III dari F-Demokrat Erma Suryani Ranik mengatakan, Komisi III akan menggelar *fit and proper test* terhadap delapan nama calon pimpinan KPK. Uji kepatutan dan kelayakan tersebut dijadwalkan 25-26 November 2015.

Sebelum dilakukan *fit and proper test*, delapan nama calon pimpinan KPK tersebut akan terlebih dahulu melakukan pembuatan makalah pada 19 November 2015. Sejauh ini, lanjut Erma, Demokrat telah menelusuri rekam jejak delapan calon. Dua di antaranya diberi catatan.



Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin

“Demokrat sejak sebelum reses sudah melakukan *tracking* dan meminta semua data dari teman-teman Pansel Capim KPK. Termasuk video ketika seleksi wawancara. Itu kita jadikan preferensi untuk mengidentifikasi para capim,” ujar Erma di Gedung DPR RI.

(ASI)/FOTO:NAEFURODJI/PARLE/IW.



Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

Fraksi PKS DPR RI mencanangkan hari Selasa sebagai hari aspirasi,

FRAKSI PKS DPR TERIMA ASPIRASI PUBLIK SETIAP SELASA

menerima pengaduan dari masyarakat. Masyarakat yang ingin datang ke gedung parlemen diharapkan tidak dipersulit untuk menyampaikan persoalan yang sedang dihadapinya.

“Ini bukan hanya untuk konstituen PKS saja tetapi terbuka bagi semua rakyat Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasinya. Ini sesuai dengan tagline partai, *berkhidmat untuk rakyat*,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam acara launching di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/15).

Ia menambahkan setiap hari Selasa pengaduan publik akan diterima mulai pukul 13.00 WIB sampai berakhir jam kerja. Namun menurutnya pada hari kerja lain masyarakat masih dapat menyampaikan aspirasi.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten III ini menyebut disamping menerima aspirasi secara langsung di sekretariat Fraksi PKS, publik juga dapat berkomunikasi lewat surat, telepon, email dan saluran lainnya. Menurutnya ada tiga fokus dalam kegiatan ini

yaitu, menyerap aspirasi, tindak lanjut dan respon atas aspirasi.

Kegiatan *launching* ini juga diikuti

Focus Group Discussion dengan pembicara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan pengamat politik Hanta Yuda. Tu-

rut hadir dalam pertemuan ini Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie.

(IKY), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR.

PILKADA SERENTAK, WASPADA UANG PALSU

Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo mengingatkan agar masyarakat mewaspadaai kemungkinan meningkatnya peredaran uang palsu seiring berlangsungnya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah. Ia meminta aparat terkait juga mengantisipasi hal ini karena disamping masalah kriminal, meningkatnya uang palsu di masyarakat dapat memicu inflasi.

"Ini sangat perlu dan penting kita waspada. Terdapat kerawanan beredarnya uang palsu dalam momen Pilkada ini. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kalau uang palsu ini beredar dapat memicu inflasi," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015).

Ia menambahkan Pilkada 2015 yang dilaksanakan serentak akan melibatkan perputaran uang dalam intensitas sangat tinggi. Namun dia belum yakin momentum ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal IV (Oktober - Desember) secara signifikan.

Menurutnya, momentum Pilkada se-

rentak memang akan mengungkit daya beli masyarakat, tapi itu hanya terbatas pada lembaga non profit, khususnya partai politik. Menilai pertumbuhan ekonomi nasional menurut politisi FP Nasdem ini tidak bisa berpatok pada suatu momentum sesaat. Sebaliknya, pertumbuhan yang berkelanjutan harus memperhatikan sektor ekspor impor, dan berbagai sektor perekonomian lainnya.

Jika besaran impor Indonesia masih lebih tinggi dibanding besaran ekspor, maka produktivitas nasional masih terhitung rendah, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, besaran impor Indonesia yang masih rendah, lebih berpengaruh terhadap lemahnya pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut Donny memperkirakan, Pilkada 2015, bulan Desember nanti kemungkinan hanya memberi andil 0,1 persen bagi pertumbuhan kuartal IV. Secara menyeluruh, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diperkirakan belum banyak berubah, masih berkutat pada kisaran angka 4,5 - 4,7 persen.



Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo

"Hitungan tersebut memang terbilang masih minim. Kalau saya memperkirakan, perputaran uang per daerah (selama pilkada) hanya sekitar 20 sampai 30 milyar saja. Jika pun ada tiga calon (pasangan kepala daerah) di daerah tersebut, hanya mencapai 50 milyar. Itulah uang yang mengelontor di daerah seperti itu, saya perkirakan," tutur dia.

Baginya Pilkada serentak secara gamblang baru bisa dilihat dampaknya pasca pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Dia berharap momen pesta demokrasi lokal itu bisa membawa efek membaiknya kondisi perekonomian. (AS/IKY)/ FOTO: JAKA/PARLE/IW.

IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN JAUH DARI ROH UU BPJS

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan sudah berjalan hampir dua tahun ini, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan keluhan dari masyarakat termasuk peraturan yang dinilai memberatkan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menilai implementasi BPJS Kesehatan jauh dari roh atau semangat UU BPJS. Padahal UU BPJS lahir karena adanya keluhan masyarakat di seluruh daerah yang menginginkan adanya jaminan kesehatan yang berlaku nasional.

"Kami dulu (Komisi IX DPR RI Periode 2009-2014) ikut membahas bagaimana luar biasanya tarik menarik pembahasan UU BPJS dimana melibatkan delapan Kementerian yang ditugaskan SBY. Namun setelah lahir akhirnya seperti ini, sebetulnya hal ini sudah diperkirakan, karena UU BPJS disahkan dengan setengah hati," papar Ribka disela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Dirut BPJS di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2015)

Dijelaskan Ribka, terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan, seluruh anggota Komisi IX telah melakukan pengawasan di



Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning

daerah pemilihannya masing-masing. Berbagai keluhan dari daerah sudah disampaikan pada saat Komisi IX Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut BPJS Kesehatan maupun saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, namun hasilnya belum memuaskan banyak pihak. “Kesannya rapat-rapat yang dilakukan untuk mengevaluasi ini seperti seremonial saja”, imbuhnya.

Ia mengakui bahwa di dalam UU MD3 itu memang tidak ada sanksi, bilamana DPR melakukan rapat dengan mitra kerja, dan hasil kesimpulan Raker ataupun RDP jika tidak dilaksanakan oleh mitra kerja tidak ada sanksi, sehingga mandul.

“Jadi akhirnya ya seperti ini. Kalau BPJS Kesehatan ini kan kronologisnya memang keluhan rakyat mulai dari Askeskin, Jamkesda, Jamkesmas. Dimana evaluasinya memang harus ada jaminan kesehatan secara nasional supaya tidak ada orang Lebak tiba-tiba sakit di Bandung kartunya tidak berlaku padahal dia masih bangsa Indonesia, maka akhirnya lahir lah BPJS,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Ia menyangkan dalam pelaksanaannya peraturan BPJS

Kesehatan ini memberatkan masyarakat. Seperti Ibu hamil tiga bulan sebelumnya harus didaftarkan. Seolah-olah peraturan yang ada sudah membatasi kuasa Tuhan kalau yang akan lahir ini akan bermasalah.

“Harusnya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan ini. Ok jika anggarannya dikatakan belum ada. Kemudian kriteria miskin kriterianya bagi siapa. Semua kriterianya tidak jelas. Kementerian Sosial memiliki kriteria yang berbeda. Menurut hemat saya, 240 juta jiwa itu harus menjadi tanggung jawab negara,” tegasnya.

“Tidak ada orang miskin yang ingin gratis tapi sakit dulu apalagi yang ditanggung negara di kelas III Rumah Sakit. Negara kita masih bisa mengasuransikan di Kelas III tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika sekarangpun baru sekian juta dan dituntut rakyat untuk gotong royong dan sudah mau untuk gotong royong tapi mendaftarkan untuk menjadi peserta harus seluruh keluarga sedangkan gajinya tidak cukup, kepesertaannya ditolak dan dipersulit,” tambahnya. (SC)

FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

PEMBAHASAN RUU MINOL DITARGETKAN SELESAI JUNI 2016

Rapat internal Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Larangan Minumal Beralkohol (RUU Minol) memutuskan, pembahasan RUU tersebut dilakukan dalam tiga kali masa persidangan dan ditargetkan selesai pada Juni 2016.

Keputusan diambil dalam rapat intern Pansus RUU Minol yang dipimpin Ketuanya Arwani Thomafi didampingi Wakil Ketua Lily Asdjudiredja dan Aryo P.S Djojohadikusumo di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut Arwani, selain menyetujui jadwal acara pembahasan RUU tersebut, rapat Pansus juga sepakat untuk mengundang beberapa pihak yang terkait dengan masalah minuman beralkohol, seperti tokoh masyarakat, ormas, tokoh dan organisasi keagamaan MUI, PGI, KWI dan PHDI, Walubi dan Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (Matakin).

Anggota Pansus Achmad Mustaqim mengusulkan agar Pansus juga mengundang Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas lain yang akrab dengan pemberantasan minuman keras (beralkohol). Mereka bisa diminta pandangannya mengenai pemberantasan



Pimpinan Pansus RUU Minol

minol sebab terkadang mereka berada di garis paling depan sehingga Pansus bisa minta pandangan dan solusi yang ditawarkan.

Dalam pembahasan RUU ini, jelas Arwani, Pansus menjadwalkan menggelar rapat kerja dengan enam kementerian yakni Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM. Pansus juga mengagendakan mengundang dan mengunjungi beberapa Pemprov yang sebagian telah memiliki Perda Larangan Minol. (MPI)/FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

MASYARAKAT TANGERANG RAYA TOLAK POLRESTA TANGERANG MASUK POLDA BANTEN

Masyarakat Tangerang Raya menolak kebijakan Gubernur Banten yang menginginkan Polresta Tangerang masuk dalam Wilayah Hukum Polda Banten.

Hal itu dikatakan Ketua Delegasi masyarakat Tangerang Raya Badarud-

din saat diterima Komisi III DPR Selasa (17/11) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Badaruddin menilai, kebijakan Gubernur Banten Rano Karno dilakukan sekoyong-koyong meminta agar Pol-

resta Tangerang masuk dalam wilayah hukum Polda Banten. Itu dilakukan tanpa komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Daerah setempat seperti Bupati, Walikota se Tangerang Raya dan khususnya kepada

masyarakat Kabupaten Tangerang dan umumnya masyarakat Tangerang Raya.

Ia menegaskan, Gubernur Banten dinilai tidak mempunyai rasa etika sebagai pejabat, tidak mempunyai etika kepemimpinan dan tidak mempunyai etika pemerintahan.

“Kami mempunyai hak untuk mempertahankan Polresta Tangerang Raya tetap berada dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagaimana yang pernah dicetuskan oleh Mabes Polri, bahwa sejak tahun 1980 menetapkan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Bekasi, Tangerang, dan Depok menjadi tanggungjawab Polda Metro Jaya dan bukan menjadi tanggungjawab Polda



Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin

Jawa Barat. Ini dilakukan agar mempermudah koordinasi pengendalian situasi kamtibmas,” tegasnya.

Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin yang didampingi sejumlah anggota menyatakan masukan ini akan menjadi bahan rapat kerja dengan mitra kerja khususnya Kapolri. “Masukan ini kita tanggapi secara positif, dan nantinya juga akan mencari keterangan dari Pemda Banten apa alasan dan pertimbangan mengeluarkan surat keputusan pemindahan Polresta Tangerang Raya tersebut,” tegas Azis. (SPY,MP), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.

TAK PERLU BANYAK BUMN TERIMA PMN

Penyertaan modal negara (PMN) sebaiknya lebih terarah dan fokus pada penanganan sektoral saja. Tak perlu banyak BUMN yang menerima PMN. Cukup beberapa saja, tapi betul-betul akan membesarkan BUMN dan bisa bersaing di tingkat ASIA.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid (F-PKB) menegaskan hal tersebut sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Senin (16/11). Pernyataan ini menyusul penundaan persetujuan anggaran PMN dalam RAPBN 2016 lalu. Perdebatan menyangkut alokasi PMN untuk BUMN sudah terjadi di Komisi VI, lalu di Banggar, dan kemudian di Paripurna. Anggaran PMN ditunda hingga pembahasan RAPBN P 2016 nanti.

“Pemerintah diberi kesempatan lagi untuk berpikir apa sih pentingnya PMN. Jangan sampai dugaannya PMN dijadikan sapi perahan dan jadi sumber kegiatan politik yang tidak perlu. PMN harus diberikan secara terbatas saja, tapi jelas tujuannya. Kalau infrastruktur kasih saja ke satu BUMN infrastruktur.

Pilih salah satu, lalu diberikan kekuatan yang lebih. Selain itu, BUMN jangan sampai mematikan sektor swasta,” papar Jazil.

Dari anggaran PMN yang diajukan pemerintah sekitar Rp 40,7 triliun dan dibagikan ke 23 BUMN itu, dinilai politisi dari dapil Jatim X ini, kurang fokus. Menurutnya, tak perlu sebanyak itu BUMN yang menerima PMN. Cukup 5-7 BUMN saja, asal betul-betul serius memfokuskan peruntukan PMN-nya. Bila ingin membangun infrastruktur, lanjut Jazil, cukup diberikan kepada Wijaya Karya saja, misalnya. Begitu juga bila ingin membangun pertanian, cukup ke salah satu PTPN saja.

Anggota Komisi V tersebut tak setuju bila dana PMN diberikan sedikit-sedikit kepada sejumlah BUMN. Ada yang menerima Rp 200 miliar, ada pula yang menerima Rp 500 miliar. “Jadi PMN dicecer-ecer begitu. Kalau nanti disuntik, tambah tidak sehat, itu bukan tujuan PMN. Tujuannya, BUMN yang disuntik makin kuat dan memberikan sumbangan kepada negara. Jangan menyuntik



Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid

yang sudah mau mati. Apalagi suntikan PMN-nya kecil. Nanti obantnya hilang, BUMN-nya mati.”

Dengan penundaan ini, sambung Sekretaris F-PKB DPR itu, pemerintah harus kembali menyusun perencanaan PMN dengan lebih matang. Selama ini, pemerintah masih dinilai kurang matang dalam perencanaan. “Menurut saya ini kesempatan bagi pemerintah untuk betul-betul serius, bukan hanya main-main,” kilah Jazil. (MHI/FOTO:JAKA/PARLE/HR

PERTAMINA PERLU LIBATKAN BPK DALAM AUDIT PETRAL

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mempertanyakan hasil audit Pertamina Energi Trading Ltd. (Petral) yang tidak melibatkan auditor negara yaitu BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan). Ia berpandangan walaupun Petral adalah anak perusahaan BUMN Pertamina seharusnya auditor negara tetap harus dilibatkan.

“Kenapa harus menggunakan auditor

asing, jika kita punya auditor negara, yakni BPK. Karena ini menyangkut keuangan negara, maka harus BPK yang melakukan audit,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/15).



Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu

Politikus F-Gerindra itu menegaskan, menurut undang-undang, untuk proses audit bagi Kementerian atau Lembaga, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN, maka harus melibatkan BPK. Tak terkecuali, Petral.

“Kita tentu akan pertanyakan kepada BPK, kenapa tidak dilibatkan dalam audit Petral,” janji politikus asal dapil Sumatera Utara itu.

Dari berbagai pemberitaan di media massa, Pertamina mengklaim, proses audit yang dilakukan auditor asing tersebut berbeda dengan audit dari BPK. Pemilihan auditor dilakukan de-

ngan seleksi yang ketat, PT Pertamina (Persero) memilih auditor asal Australia, Kordamenta.

Dikabarkan, BPK hanya melakukan audit pada laporan keuangan, operasi, dan transaksi. Sementara, auditor yang disewa Pertamina diharuskan melakukan audit forensik, atau audit menyeluruh untuk menemukan kejanggalaan dalam proses pengadaan minyak.

Pertamina beralasan, tidak dilibatkannya BPK dalam audit Petral juga sesuai dengan arahan dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk pemerintah. (SF), FOTO : JAKA/PARLE/HR.

Harus Ada Sinkronisasi Paket Kebijakan Ekonomi

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga Jilid VI, mendapat respon beragam. Namun, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah, perlu ada sinkronisasi antar paket kebijakan, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan tidak saling menghambat.

“Harus ada koordinasi antar kementerian dan lembaga bidang ekonomi, supaya tercipta sinkronisasi terhadap paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan. Implementasinya juga harus jelas, dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Anggota Komisi XI DPR, Amir Uskara, di sela-sela Rapat Paripurna, Senin (16/11/15).

Amir menilai, masih ada tumpang tindih penanggung jawab paket kebijakan. Bahkan, masih dijumpai, 1-2 Kementerian atau Lembaga, bertanggung jawab pada kebijakan yang sama.

“Dari 1-2 K/L itu, belum ada penegean, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya,” imbuh poli-

tikus F-PPP itu, sembari mengingatkan, untuk paket kebijakan yang bersifat mendorong investasi, agar dapat lebih optimal menyerap tenaga kerja lokal.

Amir juga mengingatkan, agar ada koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Akibat belum maksimalnya koordinasi, sehingga paket kebijakan ini belum di respon positif oleh Pemerintah Daerah.

“Apapun (kebijakan) yang dilakukan Pemerintah Pusat, implementasinya di daerah. Ini yang menyebabkan kendala (kebijakan tidak berjalan), sehingga perlu koordinasi yang intens antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait penanggung jawab dari implementasi kebijakan,” beber Amir.

Untuk itu, politikus asal dapil Sulawesi Selatan itu juga mengingatkan, Pemerintah harus memantau implementasi dari setiap paket kebijakan yang sudah diluncurkan, hingga tingkat daerah. Jika suatu kebijakan sudah di-



Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara

rasa berjalan dengan baik, baru mengeluarkan paket kebijakan yang lain.

“Kecuali kebijakan yang sudah dikeluarkan, namun membutuhkan kebijakan untuk mendukung, maka bisa dikeluarkan paket kebijakan yang lain,” pesan Amir. (SF), FOTO : ANDRI/PARLE/HR.

KOPERASI SETJEN DPR DIHARAPKAN BISA MERANGKUL MITRA USAHA KECIL

Sekretaris Jendral DPR RI Winantuningtyastiti berharap agar koperasi Setjen DPR RI harus bisa memfasilitasi dengan baik sekaligus membina dan merangkul mitra usaha kecil disekitar lingkungan Gedung DPR.

“Jadi koperasi diharapkan punya *networking* untuk membangun dan membesarkan mitra usaha kecil yang merupakan kewajiban dan komitmen kita semua untuk peduli kepada lingkungan sekitar,” kata Win begitu ia biasa di sapa, usai

membuka Rapat Anggota Khusus (RAK) Koperasi Setjen DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Jum’at (13/11)

Ia menjelaskan, mitra usaha kecil yakni warung-warung penaja makanan, umumnya konsumen berasal dari seluruh pegawai yang tidak hanya dari DPR tapi juga MPR, DPD. “Jika warung-warung tersebut kita rangkul dan dibina, setidaknya makanan yang diperjual belikan merupakan produk yang sehat,” terangnya.

Sementara itu, ketika ditanya Parlementaria mengenai modal usaha, dirinya menjelaskan bahwa selama ini koperasi Setjen DPR RI masih melakukan kerjasama pinjaman kepada pihak ketiga. “Ini kan menjadi tidak kompetitif, bunganya tinggi, sedangkan tuntutan anggota yaitu pinjaman dengan bunga lebih rendah dari pasar,” jelasnya.

Pinjaman modal dari pihak ketiga, ujar wanita berkerudung ini, memiliki waktu yang terbatas dan kontrak bunga yang tinggi serta ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi. “Nah, untuk bisa seperti itu maka harus memupukkan modal sendiri, uang itu modal itu harus dari anggota sendiri. Sehingga koperasi itu walaupun membawakan bunga kembali lagi kepada koperasi menjadi modal internal,” harap Win.

Selain itu, lanjutnya, tak lepas dari komitmen seluruh anggota semisal kebijakan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak diambil, “Nah itu kan bisa kembali menjadi pemupukan modal untuk koperasi itu sendiri,” tegasnya. (INJW)/FOTO:JAKA/PARLE/IV.

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti



Suasana Rapat Anggota Khusus Koperasi Setjen DPR RI

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menjelaskan Koperasi Karyawan Setjen DPR RI perlu memupuk modal sendiri demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya. Hal tersebut dikatakan Win, begitu ia disapa, usai membuka Rapat Anggota Khusus (RAK) Koperasi Setjen DPR RI, di Jakarta, Jum'at (13/11). RAK kali ini mengambil tema “Membangun Koperasi Mandiri Melalui Partisipasi Aktif Anggota”

“Jadi koperasi ini kan dari, oleh dan untuk anggota, karena memang selama ini modal usahanya banyak dilakukan melalui pinjaman dari pihak ketiga, tentu ini menjadi tidak kompetitif, dan bayar bunga tinggi, sedangkan tuntutan anggota itu kan, kita pinjam bunganya lebih rendah dari pasar,” jelas Win.

Oleh karena itu menurut Win, untuk bisa seperti itu maka koperasi harus memupuk modal sendiri melalui anggota-anggotanya, “Kalaupun membayarkan bunga nantinya akan kembali kepada koperasi menjadi modal internal, tapi kalau pinjaman ke pihak ketiga, sudah waktunya terbatas, melalui kontrak, bunganya tinggi dan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi,” tegas Win.

Selanjutnya, jelas Win, dari anggota sendiri bisa dibuat kebijakan semisal Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak diambil bisa digunakan untuk memupuk modal sendiri, “Ini memang tergantung komitmen seluruh anggota,” terangnya.

KOPERASI SETJEN DPR PERLU MEMUPUK MODAL SENDIRI

Selain permodalan, Win juga menerangkan perlunya pengurus koperasi mengelola dan merangkul mitra usaha-usaha kecil disekitar lingkungan DPR.

“Di sekitar lingkungan gedung DPR banyak usaha warung-warung yang cukup banyak, seperti warung-warung didekat TVRI, di basement, itu luar biasa dan semuanya usaha kecil, oleh karena itu koperasi harus bisa memfasilitasi sekaligus membina dengan baik,” ujarnya.

Jika hal tersebut ditindaklanjuti, tambah Win, koperasi secara langsung akan melakukan pembinaan kesehatan makanan, pembinaan untuk pengelolaan permodalan, dan membesarkan usahanya, “Itu adalah tanggung jawab koperasi, dan oleh sebab itu, kita dari Sekretariat Jenderal secara institusi yang semula bertanggung jawab terhadap usaha-usaha kecil tersebut, siap menyerahkan kepada koperasi untuk membina,” ujarnya.

Selain itu, jelas Win, Koperasi pegawai Setjen DPR, perlu juga mempunyai *networking* tentang bagaimana membangun dan membesarkan usaha kecil yang merupakan kewajiban dan komitmen kita semua untuk peduli kepada lingkungan.

Sementara itu, ditempat terpisah, Ketua Koperasi Pegawai Setjen DPR Mohammad Djazuli menerangkan bahwa peningkatan modal sendiri akan tetap diupayakan

“Masalah modal memang masalah bagi kami dan bukan masalah pelik, yang pertama modal kita utamakan modal sendiri, sehingga tadi yang kami laporkan dalam pembukaan RAK bahwa modal sendiri sudah naik menjadi 18,9 persen, itu signifikan menurut kami,” jelas Djazuli.

Namun demikian tambah Djazuli, permintaan pasar yakni anggota koperasi ditahun pertama kepengurusannya mengalami kesulitan, “Tahun pertama awal kepengurusan saya, ternyata kita kelabakan, setelah itu modal kita pupuk sampai 50 persen, namun ternyata teman-teman anggota yang ingin

minjam harus mengantri hingga tiga bulan, oleh karena itu, akhirnya kami melakukan kerjasama dengan melibatkan pihak ketiga,” ujarnya.

Djazuli menerangkan, bahwa pihak ketiga dilibatkan jika pinjaman diatas 100-150 juta, dan dibawah 100 juta menggunakan modal koperasi sendiri.

Pada kesempatan itu, Djazuli juga menjelaskan, Rapat Anggota Khusus (RAK) yang merupakan forum tertinggi kedua setelah RAT kali ini adalah forum milik anggota yang akan membuat keputusan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus.

“Jadi tidak hanya program kerja tapi juga rencana anggaran yang akan disusun oleh para pemilik koperasi yang akan dilaksanakan oleh pengurus, jadi forum inilah forum tertinggi untuk membuat program kerja pengurus, jadi membuat semacam program kerja dan anggaran,” jelasnya.

Djazuli pun memaparkan, bahwa dalam pembukaan RAK, dirinya melaporkan bahwa koperasi pegawai Setjen DPR sampai Bulan September 2015 mendapat kenaikan pendapa-

tan sekitar 23,9 persen.

“Dari target 1,6 miliar pada bulan September kemarin, triwulan ketiga kita sudah mengantongi keuntungan sekitar 2,1 miliar, saya harapkan pada akhir Desember nanti untuk program kerja yang tahun berikutnya kami bisa memenuhi target kami,” katanya.

Namun keuntungan tidak hanya dari segi profit, jelas Djazuli, seperti yang tadi disampaikan oleh Sekjen DPR selaku Ketua Pembina Koperasi Setjen DPR, keuntungan koperasi tidak hanya dari profit tapi juga benefit.

“Tidak hanya melalui keuntungan berupa uang tapi juga kesejahteraan. Misalkan peningkatan kesejahteraan, kesehatan, kemudian bantuan untuk sosial, bantuan persiapan masa pension, kita juga sudah merencanakan tahun kemarin kita sudah berikan Rp 600.000/orang dan tahun ini pun kita sudah merencanakan satu orang dapat Rp600.000 juga bantuan untuk dana pensiun, itu rencana kita,” harapnya. (NT/NJW)/FOTO:JAKA/PARLE/IW.



Anggota Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa waktu lalu di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, diharapkan tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, selain telah mengganggu aktifitas masyarakat, kebakaran ini telah terjadi hampir setiap tahun selama belasan tahun.

“Kita bersyukur kepada Allah, berkat pertolongan dari-Nya, kebakaran hutan dan lahan di Jambi mulai mereda. Ini murni pertolongan dari Allah, bukan dari Pemerintah, dengan datangnya musim hujan,” kata Anggota Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra, saat dikonfirmasi Parlemenaria melalui telepon, Kamis (19/11/15).

Sutan bersyukur, dengan meredanya kebakaran hutan dan lahan ini, masyarakat Jambi sudah bisa menikmati udara segar kembali, dan pelajar juga sudah bisa kembali bersekolah. Walaupun sebagian besar dari pelajar Jambi ini juga mengalami ketertinggalan pelajaran, karena sekolah diliburkan hampir sebulan lebih.

Politisi F-Gerindra ini berharap, Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat pasca bencana kabut asap ini. Pasalnya, walaupun kabut asap sudah mereda, masih banyak juga yang mengalami penyakit pernapasan, seperti ISPA.

Menanggapi hal ini, pekan lalu, Sutan bersama Persatuan

KEBAKARAN HUTAN JANGAN TERJADI LAGI

Istri Anggota Dewan Fraksi Partai Gerindra, menggalang bantuan untuk para korban. Diantaranya dengan membangun klinik, bantuan makanan, vitamin dan obat-obatan untuk ibu hamil, balita, serta lansia. Serta sumbangan untuk membeli kebutuhan logistik.

“Bantuan ini sebagai empati kami kepada korban kebakaran hutan, kami menyisihkan tunjangan selama 2 bulan untuk disumbangkan kepada korban. Kita memberikan solusi dan jalan keluar. Walikota dan masyarakat Jambi menyambut positif kegiatan ini,” imbuh Sutan.

Politisi asal dapil Jambi ini meminta kedepannya tidak akan ada lagi kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan kabut asap. Pemerintah harus mengambil langkah tegas kepada pelaku pembakar hutan dan lahan. Termasuk perizinan dalam pemanfaatan hutan.

“Saya mengancam, jangan lagi ada mafia perizinan. Api itu paling banyak terjadi di lahan gambut. Gambut ini lahan serapan, sehingga jangan dibuat untuk perkebunan. Karena jika sampai ada kebakaran, akan sulit untuk pemadamannya,” tegas Sutan.

Sutan menilai, pemberian sanksi yang sudah dilakukan Pemerintah kepada beberapa pelaku pembakaran hutan dan lahan, tidak terlalu efektif. Karena yang ditangkap adalah karyawan perusahaan, bukan pemilik perusahaan.

“Harapan saya, penegakan hukum ini betul-betul harus pemilik perusahaan. Karena akibat kebakaran hutan ini, masyarakat sangat terganggu. Termasuk negara tetangga yang juga terkena imbasnya. Harus ada efek jera kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan,” pesan Sutan. (SF)

FOTO: DOK./PARLE/SF

PIA DPR PEDULI MASYARAKAT PEKANBARU PASKA BENCANA ASAP



Anggota PIA DPR RI berdialog dengan masyarakat yang memeriksakan diri

Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa pemberian sembako dan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak kabut asap di lapangan Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru, Sabtu (14/11).

“Sebenarnya pemilihan daerah Pekanbaru Riau ini sudah lama kita pikirkan sejak peristiwa kabut asap kemarin, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan saat itu maka baru dilaksanakan sekarang dan untuk pemilihan daerahnya, supaya bermanfaat tepat sasaran, kami mendapat rekomendasi dari ibu Gubernur bahwa daerah Rumbai Pesisir ini masih

membutuhkan bantuan paska bencana asap,” ungkap Ketua PIA DPR RI Deisti Novanto.

Kegiatan yang bekerjasama dengan ikatan Istri Pejabat Tinggi Pratama (IPTP) dan Pejabat Tinggi Pratama Perempuan (PTPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ini memberikan bantuan berupa 450 paket sembako serta layanan pemeriksaan dan obat gratis bagi masyarakat di lingkungan Kecamatan Rumbai Pesisir. Pemeriksaan medis dilaksanakan oleh 16 orang tenaga medis yang berasal dari RSUD Arifin Achmad, RS Petala Bumi dan RSJ Tampan Pekanbaru tersebut terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis kulit, spesialis mata, spesialis THT, dokter umum, dokter gigi beserta awak paramedik lainnya.

“Kita yakin bahwa kegiatan ibu-ibu istri anggota DPR RI ini merupakan ungkapan rasa empati dan solidaritas kebersamaan atas permasalahan yang dirasakan oleh rakyat sebagai wujud rasa persaudaraan dan jalinan silaturahmi,” ujar istri Gubernur Riau Sisilita Arsyadjuliandi yang sekaligus menjabat sebagai Dewan Penasehat ikatan IPTP dan PTPP Pemprov Riau.

Antusiasme warga yang datang untuk menghadiri acara baksos ini begitu tinggi. Hal ini terlihat dari data yang terkap petugas medis dengan pemeriksaan penyakit mata sebanyak 35 orang, penyakit dalam 5 orang, anak-anak 37 orang, asma 61 orang dan penyakit kulit sebanyak 33 orang. Bagi penderita katarak, panitia penyelenggara akan merujuk masyarakat tersebut ke rumah sakit Arifin Achmad guna dilakukan operasi dan pengobatan yang keseluruhannya digratiskan. (RAY) FOTO: RIZKA/PARLE/HR

MUSIBAH KARLAHUT JANGAN SAMPAI TERULANG

Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja berharap pemerintah dapat mengambil pelajaran atas musibah kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang beberapa waktu lalu terjadi dan menimbulkan masalah besar, hingga ke negara lain.

“Di sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah masuk musim hujan, bahkan di daerah yang terkena kebakaran hutan beberapa waktu lalu juga sudah menghilang. Namun hendaknya itu bisa dijadikan pelajaran bagi pemerintah dan semua pihak, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi saat musim kemarau di tahun mendatang,” ungkap Sjachrani kepada Parlemen di Jakarta, baru-baru ini.

Dikatakan pria yang pernah dua periode menjabat sebagai Bupati Ko-

tabaru, Kalimantan selatan ini, berdasarkan pengalamannya memimpin daerah yang memiliki wilayah hutan yang cukup luas itu, pihaknya sejatinya tidak melarang pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan. Namun terlebih dahulu harus membuat batasan area hutan yang akan dibuka untuk lahan baru.

Tidak hanya itu, ia juga mewajibkan masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan untuk terlebih dahulu membuat pompa air guna memadamkan api jika meluas melebihi batasan wilayah hutan yang akan dibuka lahan baru.

“Memang sulit dan membutuhkan biaya mahal jika harus menebang satu per satu pohon untuk membuka lahan. Sebenarnya tidak perlu dilarang pem-



Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja

bukaan lahan baru jika semua itu untuk masyarakat luas. Namun syarat-syarat dan aturan tadi harus dijalankan. Agar pembakaran hutan itu tidak meluas, dan jikapun meluas dapat diantisipasi lewat pompa air tadi,” jelasnya.

Dengan demikian Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini meyakini ke depan tidak ada lagi musibah kebakaran hutan dan lahan yang meluas hingga sampai menimbulkan korban jiwa. (AYU)

FOTO: DOK./PARLE/HR

INDONESIA BELUM SIAP HADAPI MEA



Pertemuan delegasi BKSAP DPR RI dengan Kadin Thailand

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan bergulir tak lama lagi. Namun, Indonesia dinilai belum siap menghadapinya, dibanding negara-negara tetangga. Masih ada kekhawatiran mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA, antara lain dari sudut pandang kapasitas SDM, sinkronisasi kebijakan, dan daya saing.

Demikian dikatakan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Melani Leimena Suharli (F-PD), dalam rangka kunjungan BKSAP untuk menindaklanjuti resolusi AIPA dalam rangka MEA, di Thailand, Kamis (19/11/15). BKSAP juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Thailand.

Melani menilai, Indonesia sepertinya belum siap menghadapi MEA, terutama apabila dibandingkan dengan Thailand yang sudah memperkenalkan MEA pada anak-anak usia sekolah dasar.

“Namun demikian, Indonesia harus optimis. Kita bisa menonjolkan industri kreatif, misalnya dengan desain yang artistik dan orisinal, juga dengan mengadakan pameran atau ekshibisi di luar negeri,” optimis politisi asal dapil DKI Jakarta II itu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota BKSAP DPR, Andika Pandu Puragabaya (F-Gerindra) berpendapat bahwa Indonesia dalam menghadapi MEA bagaikan sesosok janin yang belum siap untuk dilahirkan.

“Kita harus menggodok kembali, apakah MEA merupakan suatu pencapaian bagi Indonesia, atau malah *suicide*?” kata politisi dapil DI Yogyakarta, seolah bertanya.

Salah satu isu yang mengemuka adalah peredaran tembakau yang dianggap dapat mengganggu produktifitas masyarakat dalam menghadapi MEA. Anggota BKSAP DPR, Siti Masrifah menyatakan bahwa kebijakan *tobacco control* yang diberlakukan Thailand dapat menjadi contoh bagi In-

donesia.

“Jumlah iklan rokok sangat ditekan, sehingga peningkatan jumlah perokok di Thailand sangat rendah. Pendidikan dan kesehatan memang patut menjadi perhatian utama,” kata Masrifah.

Politisi F-PKB itu juga menilai, kebebasan arus barang dan jasa dalam kerangka MEA juga dikhawatirkan akan meningkatkan resiko penyelundupan manusia dan narkoba. Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi darurat narkoba.

“Seluruh jajaran masyarakat harus terlibat secara langsung dalam memberantas narkoba, terutama dengan memperbaiki kondisi di perbatasan,” pesan politisi asal dapil Banten itu.

Anggota BKSAP DPR, Indro Hananto (F-PG) menekankan, jika Indonesia ingin tumbuh, perlu memberikan kenyamanan kepada para investor. “Terutama dalam desentralisasi, para pelaku usaha dipusingkan dengan perbedaan peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah,” nilai politisi asal dapil Kalimantan Selatan itu.

Isu lain yang mengemuka dalam pertemuan diantaranya terkait profesi perawat. Pasalnya, di dalam negeri, belum ada sosialisasi yang memadai mengenai MEA, khususnya kepada para perawat. UU Keperawatan di Indonesia sudah disahkan, namun Thailand sudah jauh lebih maju dalam memperhatikan kesejahteraan dan kualitas/kapasitas tenaga perawat.

Duta Besar RI untuk Thailand, Lutfi Rauf, mengatakan, memang banyak pandangan pesimis di dalam negeri terhadap MEA. Pandangan serupa juga diberikan oleh negara ASEAN lainnya.

“Nantinya dalam kerangka MEA, akan ada mekanisme transisi bagi delapan jenis profesi yang diatur melalui ASEAN *Mutual Recognition Arrangement*, jadi tidak ada *cut-off* bagi para tenaga profesional dalam pembentukan MEA di akhir 2015 mendatang,” jelasnya.

Lutfi menambahkan, ada tiga kunci utama yang harus diperhatikan dalam menghadapi MEA, yaitu meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan formal dan informal, mengurangi *logistic cost* untuk mendorong daya saing produk dalam negeri; dan terakhir, sudah saatnya kita menghilangkan ego sektoral. “Tidak ada cara lain untuk menghadapi MEA, kecuali dengan mempersiapkan diri,” ingatnya.

Sementara itu, Perhimpunan Perempuan Untuk Bangsa menyampaikan perlunya UU Perlindungan UKM; sinkronisasi kebijakan; dan mindset yang sama antara kementerian dan lembaga serta antara pusat dan daerah. (SF) FOTO:

DOK. BKSAP/PARLE/HR

SEKJEN DPR LANTIK 14 PEJABAT BARU

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti melantik 14 pejabat baru di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pelantikan para pejabat struktural ini mengikuti perubahan dinamis yang terus terjadi di DPR RI.

Dalam sambutan pelantikannya, Sekjen menyampaikan, Sekretariat Jenderal memang harus fleksibel menyambut perubahan struktural yang terjadi, agar layanan publik dan kebutuhan para anggota bisa segera dipenuhi. Mereka yang dilantik ini merupakan pejabat eselon II, III, dan IV yang akan bertugas

di Badan Keahlian Dewan (BKD).

“Harapannya teman-teman ini segera menyesuaikan dengan tuntutan, karena tidak ada pekerjaan yang berhenti. Jadi harus terus lari menyesuaikan tuntutan-tuntutan dari Dewan. Sekarang ini banyak yang sedang dikejar oleh Dewan untuk memenuhi target RUU. Maka teman-teman peneliti dan pejabat yang lain harus mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/15).

BKD, lanjut Win demikian ia biasa dipanggil, merupakan badan baru yang menyiapkan semua kebutuhan kajian, data akademis, dan hasil penelitian. MKD harus betul-betul profesional bekerja tanpa harus dicampuri kepen-



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti

tingan politik.

Win menuturkan, pelantikan ini bukan perpisahan atau perpecahan. Justru ini bagian dari menyatukan potensi dan dukungan bagi kelancaran kerja Dewan. “Tidak mudah bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, karena harus cepat menyesuaikan dengan perubahan yang ada,” ujar dia.

Sementara itu, di antara 14 pejabat yang dilantik adalah Djaka Dwi Winarko menempati Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BKD yang sebelumnya adalah Kepala Biro Humas dan Pemberitaan. Dadang Prayitna menempati Kabag Tata Usaha BKD dari sebelumnya Kabag Analisa APBN. (MHI/ FOTO: JAKA/PARLE/IW.)

THAILAND AKAN TINGKATKAN INVESTASI SEKTOR PERIKANAN DI INDONESIA



Delegasi BKSAP DPR gelar pertemuan dengan Parlemen Thailand

Delegasi DPR RI yang dipimpin Andika Pandu Puragabaya melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Thailand di Bangkok, Rabu (18/11). Pada kesempatan itu, dia menyampaikan pentingnya peran sektor industri kreatif sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi di kawasan.

“Asia Tenggara yang biasanya tergantung pada industri migas dan manufaktur kini dipenuhi oleh ide-ide baru dan kreativitas. Hal ini telah mendorong tumbuhnya jumlah wirausahawan muda dan juga membuka banyak lapangan

kerja baru,” ujarnya.

Menurut Andika, Thailand merupakan salah satu negara ASEAN dengan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang tinggi. Selain itu, kinerja sektor UKM Thailand juga merupakan yang terbaik di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.

Sistem pengembangan UKM di Thailand mengacu pada *One Tambon One Product* (OTOP) dimana setiap provinsi memiliki produk unggulan masing-masing yang diproduksi secara profesional. Selain memiliki keunggulan dari

segi industri kreatif dan UKM, Thailand merupakan partner strategis bagi Indonesia. Sayangnya, Indonesia masih terus mengalami defisit perdagangan dengan Thailand.

Dalam pertemuan ini Parlemen Thailand menekankan bahwa persoalan ekonomi dunia tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat dan tidak dapat ditangani sendiri. Oleh karena itu, kedua pihak harus meningkatkan kerja sama dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing regional.

Lebih lanjut dikatakan Andika, kerja sama di sektor perikanan rupanya menjadi perhatian khusus. Saat ini, kerja sama perikanan antara kedua negara mengalami kendala, yang menurut salah satu anggota Parlemen Thailand disebabkan oleh sektor swasta yang bekerja masing-masing. Namun saat ini, Thailand sudah melakukan revisi UU sehingga ada jaminan bahwa penangkapan ikan tidak dilakukan secara ilegal.

Thailand mengharapkan agar kerja sama perikanan dengan Indonesia dapat ditingkatkan kembali. Thailand sebagaimana dikutip anggota Dewan ini, menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya di sektor perikanan. (BKSAP,MP) FOTO: DOK. BKSAP/PARLE/HR



Wakil Ketua MKD DPR, Junimart Girsang dan Hardi Soesilo menerima laporan Menteri ESDM terkait masalah PT Freeport, Senin (16/11)
Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI membahas hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK, Rabu (18/11)
Foto : Naefuroji/Parle/HR



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti melantik Pejabat Eselon II, III, dan IV Badan Keahlian Dewan (BKD) Sekretariat Jenderal DPR, Kamis (19/11)
Foto : Jaka/Parle/HR